

RENCANA INDUK – PELABUHAN – TANJUNG BALAI KARIMUN – RENCANA INDUK PELABUHAN  
2013

PERMENHUB NOMOR PM 17 TAHUN 2013, 58 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN TANJUNG BALAI  
KARIMUN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 TENTANG Pelayaran dan Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan dan pengembangan pelabuhan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

UU No. 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 125, TLN ( No. 4437); UU No. 26 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.68, TLN No. 4725); UU No. 26 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.68, TLN No. 4725); UU No. 17 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849); UU No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059); PP No. 61 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.151, TLN No. 5070) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.193, TLN No. 5731); PP No. 5 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.8, TLN No. 5093); PP No. 20 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 26, TLN No. 5108) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 43, TLN No. 5208); PP No. 21 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.27, TLN No. 5109); PERPRES No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERPRES No. 13 Tahun 2014; PERPRES No. 24 Tahun 2010; KEPMENHUB No. KM 54 Tahun 2002; PERMENHUB No. KM 31 Tahun 2006; PERMENHUB No. PM 34 Tahun 2012; PERMENHUB No. PM 35 Tahun 2012; PERMENHUB No. PM 36 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:

Penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Tanjung Balai Karimun yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemerintahan lainnya, Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dan Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.

- CATATAN : - Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pemanfaatannya harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan;
- Permenhub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Maret 2013;
  - Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2013.